



Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View

Memudarnya Patron-Client: Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018

Masruri^{a*}, Wawan Sobari^b, George Towar Ikbal Tawwakal^c

^{a,b)}Magister Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

^{c)}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Correspondence e-mail: masrurimahali@student.ub.ac.id

Information Article

History Article

Submission : 10 November 2019

Accepted : 4 December 2019

Published : 30 December 2019

DOI Article:

[10.24905/jip.4.2.2019.75-89](https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.75-89)

ABSTRACT

This qualitative case study aims to explore the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java. The kiai's authority is absolute, the submission of the santri to the kiai is the main rule of the pesantren culture, the relationship of the kiai and santri is patron-client, there is an unequal interaction with the position of the santri being a client and the kiai becoming a patron. The strength factor of the charisma and influence of the kiai is often used for various interests in the politics of regional elections. Different from theory, the patron-client relationship in the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java is not relevant. This study finds, First, the electoral political relations of the kiai and santri are determined by the attitude of equal egalitarian relations and complementary relations. Kiai and santri both play a role in shaping voting behavior, and the kiai is no longer the dominant figure in determining santri's political choices, because there is a practice of political deliberation. Secondly, there are three typologies of electoral political relations between kiai and santri, namely, (1) Political relations are equal (associative), (2) Positive opposition political relations (dissociative-positive), and (3) Political relations mabadi 'khaira ummah ((prioritizing the interests of the ummah). Lastly, this case study of the electoral political relations of the kiai and santri adds new knowledge that the santri's political choices in regional elections are no longer based on patron-client relations.

Key word: Relation; Electoral Politics; Kiai; Santri

Studi kasus kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Otoritas kiai bersifat mutlak, ketundukan santri kepada kiai merupakan aturan utama dari budaya pesantren, hubungan kiai dan santri bersifat patron-client, adanya relasi tidak seimbang dengan posisi santri menjadi klien dan kiai menjadi patron. Faktor kekuatan karisma dan pengaruh kiai sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemenangan dalam politik pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan teori, hubungan patron-client dalam relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tidak relevan. Studi ini menemukan Pertama, relasi politik elektoral kiai dan santri ditentukan oleh sikap hubungan egaliter setara dan hubungan saling melengkapi. Kiai dan santri sama-sama berperan membentuk perilaku memilih, tidak lagi kiai menjadi sosok yang mendominasi dalam menentukan pilihan politik santri, karena adanya praktik musyawarah politik. Kedua, ditemukan tiga tipologi relasi politik elektoral kiai dan santri yaitu, (1) Relasi politik setara (assosiatif), (2) Relasi politik oposisi positif (dissosiatif-positif) dan (3) Relasi politik mabadi' khaira ummah (mengutamakan kepentingan ummat). Pada akhirnya, studi kasus relasi politik elektoral kiai dan santri ini menambah pengetahuan baru bahwa pilihan politik santri dalam pemilihan kepala daerah tidak lagi berdasarkan hubungan patron-klien.

Kata kunci: Relasi; Politik Elektoral; Kiai; Santri.

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah serentak merupakan wadah bagi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan ditingkat lokal daerah dengan dipilih secara langsung serta memilih pemimpin disesuaikan dengan aspirasi yang akan diperjuangkannya. Pemilihan umum yang diadakan di kebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. (Miriam Budiardjo, 2003). Pemilu merupakan sarana berdemokratis rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sebagai wujud dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Juni 2018 diikuti kurang lebih 115 kabupaten, 39 kota dan 17 provinsi. Terdapat 12 daerah provinsi yang berakhir masa jabatannya tahun 2018 dan ada 5 (lima) daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2019, sedangkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berakhir pada tanggal 12 Pebruari 2019 termasuk dari 12 daerah yang menyelenggarakan pilgub serentak tahun 2018.

Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, gubernur terpilih menerima mandat untuk mengimplementasikan visi misi atau janji kampanye yang telah dilakukan pada masa kampanye. Pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada langsung ini berlanjut pada fase yang melembaga dan secara berelanjutan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Hal ini akan menandai perubahan espektasi permainan

(politik). Espektasi permainan dalam konteks perubahan ke arah yang lebih baik bergerak dari *democracy delegative* menuju demokrasi dengan mandat (Agustino, 2008).

Sistem politik demokratis semakin dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, terutama pilgub menjadi menarik ketika pasangan yang berkompetisi merupakan dua tokoh yang pernah *nyantri* di pesantren sekaligus keduanya kader organisasi masyarakat terbesar di Jawa Timur yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Membicarakan politik Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dari peran kiai dan santri. Kiai dan santri dalam kontestasi pemilihan umum sering digunakan oleh politisi atau partai politik untuk mendulang suara atau simpatik dari masyarakat. Kiai dan santri merupakan figur utama di pesantren yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ketaatan santri kepada kiai dalam segala hal dipandang sebagai ketaatan yang bersifat totalitas tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Keterlibatan kiai dan santri dalam politik praktis memiliki pro kontra di masyarakat, bahkan stigma negatif selalu membayangi setiap keputusan-keputusan pilihan politik yang dilakukan kiai dan santri.

Kiai sangat menentukan arah jalan politik santri atau penikutya sebagai muridnya, seperti survei yang dilakukan Surabaya Survei Center (SCC) tentang sikap dan perilaku pemilih pilgub Jatim, menunjukkan bahwa sebagian besar publik berkeyakinan bahwa pengaruh tokoh agama (kiai) yang mereka hormati sebesar (20.90%). Besarnya pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan sangat mem-

pengaruhi hasil perolehan suara kandidat di suatu daerah. Berebut pengaruh dari tokoh agama dilakukan oleh para calon gubernur sejak tahun 2016 dan 2017 sebelum pendaftaran resmi cagub dan cawagub di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur dimulai. Safari politik dari pesantren ke pesantren dilakukan oleh para politisi menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka secara resmi. Pesantren di Jawa Timur sebagai basis utama suara masyarakat, para calon gubernur berebut mendapatkan restu kiai kharismatik menjadi nilai lebih untuk memperoleh legitimasi dukungan. Dengan faktor kekuatan karisma kiai itu pula, pengaruh kiai dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan kemenangan dalam politik elektoral pemilihan kepala daerah serentak seperti Pilgub Jawa Timur Tahun 2018.

Hubungan kiai santri memiliki hubungan yang sangat kompleks dimana hubungan kiai dan santri melebihi hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Pola hubungan kiai dan santri yang selama ini dikenal dengan ketundukan total. Ketaatannya, yang dalam pandangan kekiniaan, tampak membabi buta. Betapa tidak, apapun yang dikatakan dan diperintahkan oleh kiai ibarat wahyu yang wajib dilaksanakan dan seolah dosa jika dilalaikan. Didalam pesantren otoritas kiai bersifat mutlak. Tunduk kepada kiai merupakan aturan utama dari budaya pesantren (Greg Fealy, 2003). Pola hubungan yang terjadi selama ini antara kiai dan santri merupakan hubungan yang terbangun cukup lama. Penelitian terdahulu membagi dua pola hubungan interaksi antara kiai dan santri;

Pertama, hubungan berdasarkan *otoriter-paternalistik*, yaitu hubungan layaknya antara seorang pimpinan dan seorang bawahan (*Patron-Client Relationship*). *Kedua*, hubungan pola *Laissez faire*, yaitu relasi yang tidak lagi menjadikan hubungan atas dasar tatanan keorganisasian yang jelas, hubungan yang terjadi didasarkan atas restu kiai. Melalui restu kiai apapun yang dilakukan santri adalah merupakan pekerjaan yang pasti bisa dilaksanakan dengan baik. Santri memiliki jiwa ikhlas dalam menjalankan pekerjaan tersebut karena sebagai bentuk ketundukan, ketaatan total kepada kiai diyakini mendatangkan barokah. (Ibnu Hajar, 2009).

Beberapa penelitian lain mengenai kiai dan santri yang telah dilakukan oleh Endang Turmudi (2004) dengan penelitiannya mengenai peran kiai dalam percaturan politik masa orde baru di kabupaten Jombang. Penelitiannya memfokuskan pada peran sosial dan politik kiai di masyarakat dengan berhasil membagi empat tipe kiai yakni kiai kampung, kiai politik, kiai pesantren dan kiai tarekat. Penelitian Endang lebih condong pada peran kiai yang termasuk kedalam kiai politik sekaligus kiai tarekat. Sedangkan Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah S (2010) fokus penelitian mengenai sebuah akibat dari keterlibatan pondok pesantren didalam politik, studi kasus tersebut dilakukan di Yogyakarta, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya keterlibatan pesantren dalam politik mengakibatkan munculnya berbagai dampak cukup signifikan. *Pertama*, adanya keterlibatan dalam politik menjadikan pesantren tidak lagi

menjadi otoritas moral atau rujukan dalam menyelesaikan persoalan agama dimasyarakat. Kualitas pesantren menjadi menurun karena pengasuhnya sibuk dengan urusan politik. *Kedua*, masyarakat menjadi semakin menjauh dari pesantren karena menganggap bahwa pesantren tidak lagi menjadi pengayom atau institusi ideal tapi mempertukarkan atau mempraktekkan politik praktis hanya untuk kepentingan materi semata. *Ketiga*, munculnya penolakan masyarakat atas sikap berpolitik hingga masyarakat tidak segan untuk menolak apapun pilihan politik pesantren. Resistensi tersebut secara terang-terangan dilakukan masyarakat dengan tetap menolak pilihan politik pimpinan pesantren. Imam Suprayogo (2012) dalam penelitiannya mengenai keterlibatan kiai dan politik, memfokuskan penelitian dengan fokus membaca citra politik kiai dan Imam membagi kiai kedalam empat tipe, kiai dengan tipe spiritual, kiai tipe advokatif, kiai tipe politik adaptif, dan kiai tipe politik mitra kritis. Dalam penelitian ini menemukan bukti bahwasannya kiai di daerah Tebon sebagai elit agama dalam menentukan sikap politiknya tidak hanya bersifat normatif pada ajaran agama, melainkan juga menggunakan sifat rasional dengan menimbang untung rugi. Muhibbin (2012) mengenai Politik Kiai dan Politik Rakyat. Dalam penelitiannya berlokasi di Gresik. Menemukan dua varian pandangan tentang makna kiai berpolitik, yakni sebagian setuju dengan aktivitas kiai dalam politik dan kedua mereka tidak setuju dengan keterlibatan kiai dalam politik.

Penelitian Ana Shofiya dan M Turhan Yani (2013) meneliti tentang orientasi politik santri sebagai pemilih pemula dimana studi dilakukan di Mojokerto tepatnya di pondok pesantren Raudlatul Nasyi'in, hasil penelitian menemukan bahwa santri merupakan pemula yang belum memiliki pengalaman sama sekali dalam mengikuti pemilihan umum atau minim pengalaman dalam meentukan pilihan politik. Minimnya pengalaman menjadikan santri cuek terhadap proses pemilihan umum hingga menimbulkan sikap apatis, dengan sikap tersebut diperlukan pengenalan politik secara mendalam dengan melalui pendekatan kognitif, pendekatan afektif dan pendekatan evaluatif. Ali Hasan Siswanto (2014) dalam disertasinya tentang moral kiai politik hasil penelitian menemukan bahwa relasi kiai dan politik di Jawa Timur tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi serta moral dan politik tidak bisa dipisahkan. Moral ketuhanan dan kemanusiaan yang dipahami kiai menjadi penuntun untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Penelitian ini membagi orientasi kiai politik menjadi tiga, yaitu orientasi politik berdasarkan moral mediatif-transaksional, orientasi politik kiai dengan pola *administratif-manipulatif* dan orientasi politik kiai bersifat pragmatis-faksionis.

Penelitian dilakukan juga oleh M. Hanif Thohari (2015) mengenai perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014, hasil penelitian terdapat tiga jenis perilaku politik sebagai strategi politisi santri dalam pemilihan legislatif, yaitu digunakannya baliho dan spanduk dalam memperkenalkan diri, strategi kampanye

blusukan, dan strategi menghadiri acara di komunitas pengajian, tiga strategi tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan tindakan sosial yang berbeda-beda yaitu berupa tindakan rasional instrumental dan strategi tindakan tradisional.

Sedangkan tulisan ini lebih fokus mengkaji tentang relasi politik elektoral kiai dan santri ketika berlangsungnya kontestasi pilgub Jatim. Penulis ingin melihat bagaimana relasi politik elektoral kiai dan santri di Kabupaten Malang. Apakah kiai berperan membentuk perilaku memilih santri serta hal apa saja dapat merubah perilaku memilih santri. Lokasi penelitian relasi politik elektoral kiai dan santri di kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang dalam kontestasi Pilgub Jatim tahun 2018 dengan periode jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2019-2024.

Kiai dan santri dalam memainkan peran politiknya tidak bisa dilepaskan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai dan santri selalu mengedepankan nilai-nilai dari garis perjuangan NU. Menurut Titik Triwulan Tutik dan Jonaedi Efendi (2008) ada tiga kategori utama dari doktrin politik NU yaitu kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Kebijaksanaan digunakan dalam pengertian bahwa bila dihadapkan pada dua pilihan yang sulit maka diutamakan mengambil yang risikonya lebih kecil, sedangkan keluwesan dipahami sebagai sikap tidak kaku dimana NU akan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa merubah nilai-nilai ajaran agama itu sendiri dan berkolaborasi baik dengan lingkungan budaya lokal. Perilaku moderat dalam politik sudah dilakukan NU

ketika masa pemerintahan dipimpin presiden Soekarno hingga sekarang dengan menghindarkan sikap radikal atau bertentangan dengan politik partisan lebih mengedepankan politik kebangsaan.

Adanya kecenderungan saling dukung terhadap calon tertentu dalam setiap kontestasi pilkada maupun pemilihan umum merupakan hal yang wajar. Sesuai dengan konsep doktrin politik NU, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan politik kiai dan santri dalam pilgub adalah :*Pertama*, tingkat pemahaman politik yang berbeda antara kiai dan santri dimana kiai atau santri cenderung melihat politik berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari media massa dan jaringan pesantrennya. Sedangkan media massa sendiri memiliki kecenderungan memiliki keberpihakan terhadap salah satu calon. *Kedua*, kiai dan santri memiliki kepentingan bersama dalam memberikan dukungan terhadap calon tertentu. *Ketiga*, prinsip yang dimiliki bersama dalam menjalankan politik praktis dengan konsep *mabadi khaira ummah*. Ketiga faktor ini menjadikan kiai dan santri dapat saling mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilihan gubernur. Maka perlu dilakukan kajian lebih fokus tentang relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pilgub Jatim.

Apakah hal yang menarik dari relasi politik elektoral kiai dan santri? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pilgub Jatim di kabupaten Malang. Peneliti ingin melihat seberapa jauh faktor-faktor yang

mempengaruhi pilihan politik kiai, dan santri dalam pilgub Jatim.

2. Metode

Penelitian kualitatif ini dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam sebuah peristiwa sosial/budaya (Yanuar Ikbar, 2012). Berdasarkan pemikiran tersebut bahwa penelitian kualitatif dapat menjelaskan fakta dengan analisa secara mendalam dan komprehensif. Penelitian berlangsung selama tiga bulan pada tahun 2019 di Gondanglegi Kabupaten Malang. Data diperoleh dari 14 informan yang diwawancarai dengan secara mendalam (*indepth interview*). Peneliti memilih informan yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji meliputi informan utama terdiri dari kiai yang aktif di partai politik, kiai intelektual dan kiai thariqat, ketiga kiai tersebut memiliki pengaruh dalam menentukan perilaku pemilih santri. Informan kunci memiliki hubungan langsung dengan informan utama yang terdiri dua informan santri yang mukim atau santri menetap, dua informan santri kampung (santri kalong), dua informan lulusan santri (santri alumnus), dua informan santri luar sedangkan informan pendukung terdiri kepala desa dan dua ketua badan otonom Nahdlatul Ulama. Validitas dan analisis data dengan tiga tahap meliputi pengumpulan, reduksi dan penyajian dan penarikan kesimpulan (Milles, Huberman dan Saldana, 2014). Dalam memastikan keabsahan data melalui proses triangulasi sumber (Sugiyono, 2017). Penggunaan data meliputi data primer dan data sekunder berupa sehingga dapat

menggambarkan suatu keadaan tentang relasi politik elektoral kiai dan santri di kabupaten Malang pada Pilgub Jatim tahun 2018.

3. Hasil dan Pembahasan

Tipologi Kiai dan Santri Dalam Masyarakat Kabupaten Malang

Pondok pesantren tahun 1853 memiliki santri sejumlah 16.556 yang tersebar di pulau Jawa pada 13 kabupaten (Dhofier, 1990). Karakteristik dari pesantren adalah terdapat asrama tempat tinggal santri, terdapat masjid atau mushola sebagai tempat ibadah dan belajar, dan terdapat pembelajaran dengan kajian kitab klasik serta ciri yang khas paling utama adanya santri atau murid dan kiai sebagai pengasuh. Kiai dan santri sebagai ciri karakteristik utama dalam sebuah pesantren. Kiai tidak hanya sebagai pengasuh disebuah pesantren dengan mendidik para santri tetapi kiai memiliki peran dimasyarakat sebagai pengayom dan tempat masyarakat bertanya dalam segala hal tidak hanya permasalahan agama.

Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan dengan 378 desa 12 kelurahan 3.115 Rukun Warga dan 14.696 Rukun Tetangga (Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, 2019). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilgub tahun 2018 sebesar 1.981.469 terbesar kedua setelah kota Surabaya. Menurut data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur kabupaten Malang merupakan daerah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak se-Jawa Timur memiliki 621 pondok pesantren.

Tabel 1 Jumlah Pesantren di Wilayah Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Jumlah Pesantren
----	-----------	------------------

No	Kecamatan	Jumlah Pesantren
1	2	3
1	Donomulyo	12
2	Kalipare	11
3	Pagak	13
4	Bantur	27
5	Gedangan	11
6	Sumbermanjing	12
7	Dampit	19
8	Tirtoyudo	3
9	Ampelgading	7
10	Poncokusumo	36
11	Wajak	27
12	Turen	29
13	Bululawang	36
14	Gondanglegi	92
15	Pagelaran	20
16	Kepanjen	23
17	Sumberpucung	10
18	Kromengan	3
19	Ngajum	12
20	Wonosari	5
21	Wagir	7
22	Pakisaji	23
23	Tajinan	22
24	Tumpang	16
25	Pakis	20
26	Jabung	10
27	Lawang	17
28	Singosari	20
29	Karangploso	24
30	Dau	18
31	Pujon	22
32	Ngantang	8
33	Kasembon	6
Total		621

Sumber : data diolah dari Kanwil Kemenag Jatim , 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pesantren terbanyak berada di kecamatan Gondanglegi dengan jumlah 92 pondok pesantren. Gondanglegi selain sebagai daerah basis utama santri yang memiliki jaringan politik cukup luas dan sangat diperhitungkan dalam kancah politik lokal juga sebagai daerah asal elit politik di kabupaten Malang seperti Bupati Malang dan beberapa elit pengurus partai politik yang berasal dari daerah ini. Banyaknya jumlah pesantren menandakan

bahwa kiai sebagai elit agama dengan kharismanya memiliki peran penting dalam tata kehidupan sosial dan politik masyarakat Gondanglegi sehingga dengan sadar masyarakat mengikuti apa yang dilakukan oleh kiai. Posisi kiai dimasyarakat memiliki posisi kuat yang dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, kiai merupakan tokoh lokal dengan pengetahuan diatas rata-rata masyarakat mengenai ilmu agama dan kepadanya penduduk desa belajar. *Kedua*, seorang kiai kebanyakan dari keluarga yang memiliki status ekonomi mampu dan tidak sedikit juga kiai yang kurang berada sejak awal mengajarkan Islam (Endang Turmudi, 2004).

Kata kiai dalam masyarakat jawa dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai keramat atau memiliki tuah yang luar biasa. Orang disebut kiai pada mulanya sebab ilmu dan pengabdian yang diberikannya bagi masyarakat. Pengabdian dia tulus ikhlas dan tanpa pamrih apapun. Terlepas darimana asal kata dan kemunculan istilah kiai, term kiai dalam kenyataannya tidak hanya mengurus tentang agama seperti halnya ustadz atau syekh, sosial keagamaan juga sangat melekat dalam diri kiai. Kiai selalu dijadikan rujukan bagi masyarakat karena apapun yang diucapkan merupakan fatwa yang diikuti oleh santrinya.

Imam Suprayogo (2012) penelitiannya mengenai keterlibatan kiai dan politik, membagi kiai kedalam empat tipe; kiai tipe spiritual, kiai tipe advokatif, kiai tipe politik adaptif, dan kiai tipe mitra kritis.

Tabel 2 Tipologi Kiai dan Afiliasi Politik

No	Tipologi Kiai	Afiliasi dan Karakteristik Kiai	
		Afiliasi Politik	Karakteristik

No	Tipologi Kiai	Afiliasi dan Karakteristik Kiai	
		Afiliasi Politik	Karakteristik
1	2	4	5
1	Kiai Spiritual	Partisipasi Pasif	Apatis terhadap politik
2	Kiai Advokatif	Partisipasi Kalkulatif	Afiliasi politik tidak tampak
3	Kiai Politik-Adaptif	Partisipasi Kalkulatif	Berafiliasi dengan partai politik
4	Kiai Politik-Mitra Kritis	Partisipasi Aktif, Kritis	Berafiliasi dengan partai politik dan Kritis

Sumber : *data diolah peneliti 2019*

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tipologi kiai spiritual dan kiai advokatif semakin berkurang dimana kedua tipe kiai tersebut kini didominasi oleh kiai tipe politik yang adaptif dan kiai tipe politik bermitra kritis. Kedua tipe kiai tersebut melakukan afiliasi politik dengan berbagai macam cara ada yang membangun afiliasi politik dengan terlibat langsung dalam struktur partai politik dan terang-terangan mendukung calon gubernur yang diusung oleh partai politik. Bahkan kiai politik-adaptif melakukan lobby politik sebelum dibukannya secara resmi pendaftaran calon gubernur dengan mengirim surat kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi. Saling dukung kiai tidak hanya dari struktural Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, dari daerah-daerah pengurus cabang NU juga melakukan hal yang sama berkirim surat agar Partai Kebangkitan Bangsa bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk merekom Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi calon gubernur. Tidak hanya menampilkan dukungan dari tokoh-tokoh struktural NU tapi juga melibatkan kiai-kiai lokal di daerah yang

memiliki basis massa besar dengan latar belakang pengasuh pondok pesantren.

Sedangkan santri dikenal dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki ketaatan dan kepatuhan tinggi dalam menjalankan ajaran agama Islam. Lebih dari itu bahwa santri harus memiliki sikap ketundukan terhadap kiai. Ketundukan seorang santri terhadap kiai dalam pandangan kekinian tampak membabi buta. Betapa tidak, apa pun yang dikatakan dan diperintahkan oleh kiai ibarat wahyu yang wajib dilaksanakan dan seolah dosa jika dilalaikan (Ibnu Hajar, 2009). Ketaatan dan ketundukan santri kepada kiai diyakini mendatangkan barakah. Barakah ialah sebuah term sakral dan nyaris menjadi satu-satunya 'barang' yang dicari dari kiai. Bagi santri ketaatan dan kepatuhan total kepada kiai diyakini sebagai garansi untuk mendapatkan barakah. Selama ini persepsi pola hubungan santri dengan kiai selalu dianggap sebagai pola *patron-klien* dimana santri selalu harus tunduk sebagai seorang hamba atau hubungan ini menjadikan kiai sebagai patronnya. (Endang Turmudi, 2004).

Sedangkan tipologi santri di kabupaten Malang seperti menurut Dhofir dalam sebuah pesantren terdiri empat jenis santri. *Pertama*, santri mukim menetap dalam sebuah pesantren untuk belajar suatu keahlian (dalam hal ini ilmu keagamaan) atau mengabdikan kepada kainya. Mereka biasanya tinggal diasrama yang disediakan dan belajar hidup mandiri juga bekerjasama dengan santri-santri yang lainnya. Santri mukim ini biasanya berasal dari daerah yang cukup jauh sehingga tidak memungkinkan

untuk pulang setiap hari kerumahnya. Selain itu diantara mereka ada juga yang tidak begitu jauh asalnya tetapi ingin lebih fokus dalam belajar juga lebih dekat dengan sehingga lebih mudah mendapat limpahan barakahnya. Mereka tidak hanya mendapat pelajaran secara lisan, tetapi juga dapat memperhatikan keseharian kiainya untuk kemudian dicontoh. *Kedua*, santri kalong (*cologen/nyolok*) santri kampung, mereka hanya belajar (mengaji) dalam waktu yang ditentukan, kemudian kembali kerumahnya masing-masing. Sehingga mereka tidak terikat dengan peraturan pesantren dan dapat keluar masuk pesantren setelah menyelesaikan pelajarannya. Biasanya santri kalong ini berasal dari tetangga-tetangga pondok pesantren maupun tetangga desa. *Ketiga*, santri alumnimerupakan santri yang sudah *boyongan* dari pesantren tetap masih mengaji pada saat tertentu dan menghadiri kegiatan rutin yang diadakan pesantren pada waktu tertentu dan patuh terhadap kiai meski sudah tidak lagi menetap di pesantren. *Keempat*, santri luar merupakan santri yang mengaji atau mengabdikan kepada pesantren meski tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren tersebut tetapi memiliki ikatan emosional yang besar terhadap kiai atau pengasuh pesantren dan membantu pesantren dengan tanpa pamrih. (Arifin, 1993: 77 dan Usman, 1988:109). Santri mukim dan santri kalong ini memiliki tingkat kepatuhan yang sama dalam mengamalkan ajaran agama dan ketundukkan yang sama terhadap kiainya sampai santri ini keluar dari pondok pesantren. Santri yang terlibat secara langsung dalam proses-proses politik di pemilihan gubernur tersebut adalah

santri Alumnus dan Santri Luar dimana kedua tipologi santri ini yang memiliki hubungan secara intens dengan kiai tipe politik adaptif dan kiai tipe politik mitra kritis.

Santri dan kiai dalam masyarakat kabupaten Malang memiliki tempat tersendiri dimana perannya tidak hanya sebagai pengasuh pesantren tapi memiliki pengaruh luas dalam bidang sosial dan politik. Berikut tabel tipologi santri dan afiliasi politiknya dalam penelitian ini.

Tabel 3 Tipologi Santri dan Afiliasi Politik

No	Tipologi Santri	Afiliasi dan Karakteristik Santri	
		Afiliasi Politik	Karakteristik
1	2	4	5
1	Santri Menetap (Mukim)	Partisipasi Pasif	Tertutup, Menetap di Asrama; Tidak peduli kepada politik
2	Santri Kampung (Kalong)	Partisipasi Kalkulatif	Terbuka; dinamis; Tidak menetap di Asrama; Afiliasi politik tidak tampak
3	Santri Alumni (Alumnus)	Partisipasi Kalkulatif	Terbuka; Lulusan Pesantren; dinamis; inovatif; Dekat dengan penguasa; Politik sebagai instrumen; Berafiliasi dengan partai politik
4	Santri Partisipan (Luar)	Partisipasi Aktif, Kritis	Tertutup; politik sebagai instrumen; Lebih dekat dengan penguasa; Berafiliasi dengan partai politik

Sumber : *data diolah peneliti 2019*

Dari tabel tersebut bahwa diketahui tipologi kiai dan santri yang terlibat dalam proses politik dalam Pilgub Jatim yang ada di

Gondanglegi kabupaten Malang terdiri dari tipologi kiai politik adaptif dan kiai politik mitra kritis sedangkan santri yang terlibat dalam politik atau memiliki afiliasi dengan partai politik adalah tipologi santri alumnus dan santri luar. Kedua tipologi kiai dan santri ini mampu berbagi peran penting ketika proses pemilihan dan memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga terjadinya proses relasi politik elektoral diantara keduanya.

Posisi Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2018

Pemilihan Gubernur Jawa Timur merupakan kontestasi antara dua calon Gubernur dengan latar belakang santri yaitu Khofifah Indar Parawansa selaku ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama dan Saifullah Yusuf sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Keduanya di tahun 2008 dan 2013 bersaing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, kontestasi ini yang ketiga kalinya.

Dukungan dari kiai-kiai terpecah menjadi dua kubu, ada yang mendukung Khofifah Indar Parawansa dan ada juga yang mendukung Saifullah Yusuf untuk maju dalam pencalonan gubernur. Besarnya dukungan terhadap dua tokoh ini menjadikan pemilihan gubernur benar-benar menjadi arena kontestasi sesama kiai dan santri untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Jawa Timur.

Saifullah Yusuf didukung penuh oleh struktural pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sedangkan Khofifah Indar Parawansa didukung oleh struktural pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT)

melakukan kritik dengan keras adanya 21 surat dari kiai-kiai sepuh untuk mendukung Saifullah Yusuf. Kiai kampung merasa bahwa rekomendasi kiai sepuh untuk satu calon gubernur merupakan bentuk pilih kasih seperti yang disampaikan Gus Fahrur sebagai koordinator FK3JT kiai sepuh seharusnya mengayomi semua umat, yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Kiai kultural merasa ditelung kiai struktural. (M Didi R, 2018). Dalam proses berjalannya kampanye perebutan basis dukungan benar-benar menjadi terbagi ada pengurus NU yang mendukung Khofifah Indar Parawansa dan pengurus Muslimat NU mendukung Saifullah Yusuf dimana Khofifah tidak sepenuhnya didukung oleh pimpinan-pimpinan cabang NU dibawahnya. Begitu juga pimpinan cabang NU Kabupaten Malang secara resmi mendukung Syaifullah Yusuf dan melakukan Apel Besar bersama seluruh Badan Otonom NU sebagai bentuk deklarasi dukungan. Selain itu pimpinan cabang Muslimat NU kabupaten Malang merupakan cabang yang secara resmi tidak mendukung Khofifah Indar Parawansa.

Pilgub Jatim dimenangkan oleh pasangan nomor satu Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dengan perolehan 10.465.218 suara sah atau 53.55%, dan perolehan pasangan nomor dua Drs. H. Saifullah Yusuf dan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP memperoleh 9.076.014 suara sah atau 46,45% dengan jumlah keseluruhan dari 38 kota/kabupaten 20.323.259 suara, sedangkan suara sah 19.541.232 dan tidak sah 782.027 suara.

Berbeda dengan perolehan suara tingkat provinsi pemenang Pilgub di kabupaten Malang pasangan nomor urut dua yaitu Drs.H. Saifullah Yusuf dan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP dengan jumlah perolehan 621.650 suara dan Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc memperoleh 588.727 suara. Selisih perolehan suara dari kedua pasangan sebesar 32.923 suara atau 1% dari perolehan suara keseluruhan. Tidak dipungkiri peran serta kiai dan santri di Kabupaten Malang berdampak terhadap hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Keterlibatan kiai dan santri, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan badan otonom NU di kabupaten Malang menunjukkan bahwa kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar memperebutkan suara dari kalangan Nahdliyin. Berbeda dengan perolehan suara tingkat kabupaten di kecamatan Gondanglegi sebagai daerah dengan jumlah pesantren terbanyak pemenang pilgub adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.

**Tabel 4 Perolehan Suara di Wilayah
Gondanglegi Kabupaten Malang
Pada Pilgub Jatim Tahun 2018**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara	
	Perolehan Suara	Prosentase Suara (%)
1	2	3
Khofifah Indar Parawansa - Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc	18.478	53.20
Drs. H. Saifullah Yusuf - Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP	16.257	46.80

Sumber : data diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, 2019

Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa daerah Gondanglegi sebagai daerah dengan jumlah pesantren terbesar di kabupaten Malang dimenangkan oleh Khofifah Indar

Parawansa. Kemenangan Khofifah Indar Parawansa ini merupakan sebuah kejutan yang sebelumnya Gus Ipul melakukan safari politik yang sangat intens di wilayah Gondanglegi.

Terbelahnya dukungan dari pesantren-pesantren di Gondanglegi tidak lepas dari partisipasi aktif dari kiai dan santri. Kiai dengan jaringan santri alumnus dan santri luar melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur untuk memenangkan masing-masing calon gubernurnya. Ada dua kutub besar yang menjadi faktor utama dalam kontestasi tersebut yaitu kiai yang berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Muslimat NU.

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang mengusung Gus Ipul sedangkan Muslimat NU mengusung Khofifah sebagai calon gubernurnya. Peran politik kiai dan santri memperebutkan suara basis NU tidak hanya terpola menjadi dua afiliasi tetapi pengaruh besar lainnya dari pengasuh-pengasuh pesantren untuk memilih calon gubernur yang benar-benar peduli terhadap pesantren. Santri alumnus dan santri luar menjadi ujung tombak kiai dalam mensosialisasikan program-program dan visi misi pasangan calon gubernur. Adanya santri yang tidak searah mendukung pilihan kiai menjadikan Pilgub Jatim menjadi dinamis.

Program unggulan beasiswa madin (madrasah diniyah) menjadi program yang digunakan untuk menggaet simpati para pemilih dari kalangan pesantren, hingga akhirnya pesantren-pesantren banyak yang beralih dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dengan program Nawa Bhakti Satya dan tagline Wes Wayahe sebagai unggulannya. Meski

memiliki perbedaan mendasar antara dukungan kiai dengan santrinya dalam pilgub jatim atau memiliki sikap berbeda-beda dalam pilihan politik, namun dalam memandang kepentingan pesantren memiliki sikap yang sama.

Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri

Dalam istilah sosiologi relasi atau *relation* adalah hubungan antar sesama. Pola hubungan kiai dan santri yang selama ini dikenal dengan ketundukan total. Betapa tidak, apapun yang dikatakan dan diperintahkan oleh kiai ibarat wahyu yang wajib dilaksanakan dan seolah dosa jika dilalaikan. Menurut Greg Fealy, didalam pesantren otoritas kiai bersifat mutlak. Tunduk kepada kiai merupakan aturan utama dari budaya pesantren. (Greg Fealy, 2004).

Menurut Spreadley dan Mc Curdy dalam Ali Hasan, hubungan antar individu dimana hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama maka akan menjadi sebuah pola relasi sosial, dua jenis pola relasi sosial yakni (a) relasi sosial asosiatif yaitu pola relasi sosial yang cenderung menyatukan atau mempererat seperti kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi; (b) relasi sosial disosiatif yaitu pola relasi yang memisahkan atau berupa pertentangan dimana yang terbentuk oposisi. (Ali Hasan Siswanto, 2014).

Relasi yang terjadi selama ini antara kiai dan santri merupakan hubungan yang terbangun sudah cukup lama. Dalam pilgub Jatim relasi yang terbangun antara kiai dan santri mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh Persepsi santri alumnus terhadap pandangan politik kiai juga mengalami perubahan, seperti yang

disampaikan Ahmad Anwar bahwasanya politik pilihan kiai tidak selamanya harus diikuti karena harus melihat kepentingan yang lebih besar dimasyarakat (Wawancara AA, April 2019).

Rasionalitas berfikir mempengaruhi santri dalam menentukan pilihan politik. Keterbukaan akses informasi dan wawasan santri menjadikan pilihan politik santri berdasarkan logika dan lebih demokratis. Penilaian santri terhadap calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan jejak prestasi, kualitas dan kemampuan dalam menyampaikan visi dan misi yang rasional. Santri menganggap bahwa sebagai alumnus memiliki kemandirian sendiri dalam menentukan saluran politiknya. Toh ketika sowan ke kiai politik adaptif menegaskan bahwa silahkan alumnus memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing karena kedua calon adalah sama-sama kader NU. (Wawancara AI, April 2019). Berbeda dengan kiai politik mitra kritis yang meminta santri untuk memilih dan mendukung sesuai dengan kepentingan pesantren. Kalo ada santri yang tidak mau memilih dengan pilihan kiai sepuh berarti santri tersebut tidak memiliki rasa hormat yang besar. (Wawancara HH, April 2019). Harapan tinggi dari kiai adalah santri dalam berpolitik mengedepankan pedoman makna dari *siyasaḥ mabadi' khaira ummah*. (Wawancara MY, April 2019).

Hasil penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitaian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kiai kini bersikap terbuka dalam pemilihan gubernur dan hanya memberikan rambu-rambu kandidat yang layak untuk didukung. Penelitian terdahulu selalu

mengatakan bahwa hubungan kiaisntri merupakan hubungan *otoriter-paternalistik*, atau pola relasi sosial antara tuan dan pembantu atatu atasan dan bawahan (*Patron-Client Relationship*).

Dalam pemilihan gubernur ini relasi hubungan kiai dan santri memiliki relasi yang jelas dimana santri menjadi tim sukses bersama kiai sedangkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa relasi kiai santri merupakan hubungan *Laissez faire*, berupa pola relasi sosial yang berdasarkan pada tatanan organisasi yang tidak jelas semua selalu dilandasi oleh restu kiai.

4. Simpulan

Pilgub Jatim di Gondanglegi kabupaten Malang menjadi pemilihan yang menarik dimana santri memiliki perbedaan dalam menyikapi dukungan antara kiai tipe politik adaptif dan kiai tipe politik mitra kritis. Santri tidak lagi menjadi obyek, tetapi kiai memberikan ruang partisipasi santri untuk menjadi pelaku dari proses politik tersebut.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan gubernur menemukan relasi politik elektoral kiai dan santri terdiri dari: Pertama, relasi politik kiai dan santri ditentukan oleh dua sikap hubungan egaliter setara dan hubungan saling melengkapi dimana kiai dan santri sama-sama berperan membentuk perilaku memilih dengan tidak lagi kiai menjadi sosok yang mendominasi dalam menentukan pilihan politik santri, karena adanya praktik musyawarah politik. Kedua, ditemukan tiga tipologi relasi politik elektoral kiai dan santri yaitu, (1) Relasi politik setara (assosiatif), (2) Relasi politik oposisi positif

(dissosiatif-positif) dan (3) Relasi politik *mabadi' khaira ummah* (mengutamakan kepentingan ummat). Temuan ini menjadi menambah pengetahuan baru bahwa *patron-client* tidak relevan dalam relasi politik elektoral kiai santri.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bag.Tapemdes Kabupaten Malang. 2018."Banyaknya Kelurahan Desa RW dan RT Per-Kecamatan". Diakses dari(<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/409/banyaknya-kelurahan-desa-rw-dan-rt-per-kecamatan-2015.html>) pada tanggal 30 Maret 2019.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darwis. 2015. *Dialektika Politik Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2015. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- DZ, Abdul Mun'im. 2010. *Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU.
- Ernas, Saidin dan Muhammadsyah S, Ferry. 2010. "Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik". Dalam *Kontekstualita*, Vol. 25, no.2, hal 195-224, 2010.
- Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Feillard, Andree. 2009. *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Greetz, Clifford. 2017. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Hajar, Ibnu. 2009. *Kiai Ditengah Pusaran Politik*. Jogjakarta: IRCiSoD

**JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah,
Vol.4 (2), Oktober 2019- 88**

Masruri^a, Wawan Sobari^b, George Towar Ikbal Tawwakal^c

- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M Jakarta.
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Heywood, Andre. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikbal, Yanuar. 2014. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: Refika Aditama.
- Iqbal Muhtarom. 2018. "Maju di Pilgub Jatim, Khofifah Mulai Galang Dukungan Muslimat NU". Melalui <https://pilkada.tempo.co/read/1030801/maju-di-pilgub-jatim-khofifah-mulai-galang-dukungan-muslimat-nu>
- Isra, Saldi, 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- KPU Kabupaten Malang. 2018. *Formulir Model DB1-KWK:Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018*. Malang.
- Kemendagri. 2018. "Data Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018", Melalui <https://kemendagri.go.id/berita/d-3634982/data-daerah-yang-melaksanakan-pilkada-serentak>
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2018. "Data Umum Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur". Melalui <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/xloq1395925488.pdf>
- K. Yin, Robert. 2018. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum DI Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M Didi Rosadi. 2018. "Hanya Rekom Gus Ipul, Kiai Kampung Kritik Kiai Sepuh Pilih Kasih". Melalui <https://www.bangsaonline.com/berita/34310/hanya-rekom-gus-ipul-kiai-kampung-kritik-kiai-sepuh-pilih-kasih>
- Mubaraq, Zulfi. 2011. *Perilaku Politik: Pandangan Kiai dalam Konspirasi Politik Era Gus Dur*. Malang: UIN-Maliki Press
- Muhibbin. 2012. *Politik Kiai Vs Politik Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2001. *Kiai Presiden, Islam dan TNI: Di Tahun-tahun Penentuan*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Rofiq. 2018. "Dukung Gus Ipul, Ketua PW NU Jatim Kirim Surat buat Mega". Melalui <https://news.detik.com/berita/d-3634982/dukung-gus-ipul-ketua-pwnu-jatim-kirim-surat-buat-mega?>
- MT, Vanni Anggara. 2017. *Lingkar Politik Pesantren: Membaca Perubahan Situasi dan Perilaku Politik Kiai Tahun 1971-2014*. Malang: MafIA Press.
- Morissan. 2016. *Statistik Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Shofiya, Ana dan Yani, M Turhan. 2014. "Orientasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 2, no.2. Hal 611-624.
- Siswanto, Ali Hasan. 2014. *Moral Kiai Politik (Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur)*. Disertasi Doktor, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Suprayogo, Imam. 2007. *Kyai dan Politik (Membaca Citra Politik Kyai)* Malang: UIN-Malang Press.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thohari, M Hanif. 2015. "Perilaku Politik Santri Pada Pemilu Legislatif". *Paradigma*, Vol. 3, no.1. hal 1-9, 2015.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan dan Efendi Jonaedi. 2008. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lintas Pustaka.

**JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah,
Vol.4 (2), Oktober 2019 - 89
Masruri^a, Wawan Sobari^b, George Towar Ikbal Tawwakal^c**

Profil Penulis

Masruri, Ketua Yayasan Kebangsaan Kemanusiaan Indonesia (YSKKI Foundation) dan Direktur Malang Pluralisme Institute. Saat ini tercatat menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Wawan Sobari, lulusan S1 Universitas Padjajaran Bandung, S2 Institute Of Social Studies,

The Hague dan S3 Flinders University. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

George Towar Ikbal Tawwakal, lulusan S1, S2 dan S3 Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.